



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 74 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Perturan Pemeritah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 65 Tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.264.595.856.820,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp.150.367.949.018,00 sehingga menjadi Rp.1.414.963.805.838,00 sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan | |
| 1. Semula | Rp.1.220.463.475.453,00 |
| 2. Bertambah / berkurang | <u>Rp. 67.571.821.171,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp.1.288.035.296.624,00 |
| b. Belanja | |
| 1. Semula | Rp. 1.264.595.856.820,00 |
| 2. Bertambah / berkurang | <u>Rp. 150.367.949.018,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | <u>Rp.1.414.963.805.838,00</u> |
| Surplus / (Defisit) setelah Perubahan | (Rp. 126.928.509.214,00) |

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| c. Pembiayaan | | |
| 1. Penerimaan | | |
| 1. Semula | Rp. 54.132.381.367,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 85.078.846.394,64</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 139.211.227.760,64 |
| 2. Pengeluaran | | |
| 1. Semula | Rp. 10.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah / berkurang | <u>Rp. 2.282.718.546,64</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | <u>Rp. 12.282.718.546,64</u> |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan | | Rp. 126.928.509.214,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan | | Rp. 0,00 |

Pasal 2

| | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. 175.132.847.400,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 21.506.350.500,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | Rp. 196.639.197.900,00 |
| b. Dana Perimbangan | | |
| 1. Semula | Rp. 857.254.978.182,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 5.219.494.026,00</u> | |
| Jumlah Perimbangan setelah Perubahan | | Rp. 862.474.472.208,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1. Semula | Rp. 188.075.649.871,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 40.845.976.645,00</u> | |
| Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan | | Rp. 228.921.626.516,00 |
| (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | | |
| a. Pajak Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. 109.472.000.000,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 3.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | Rp. 112.472.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------|
| b. Retribusi Daerah | | | |
| 1. Semula | | Rp. 40.381.123.400,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | <u>Rp. 6.204.310.000,00</u> | |
| Jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 46.585.433.400,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | | |
| 1. Semula | | Rp. 4.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | <u>Rp. 1.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | | Rp. 5.000.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | |
| 1. Semula | | Rp. 21.279.724.000,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | <u>Rp. 11.302.040.500,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | | | Rp. 32.581.764.500,00 |
| (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | | | |
| a. Dana Bagi Hasil | | | |
| 1. Semula | | Rp. 128.386.475.182,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | <u>Rp. 5.219.495.026,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan perubahan | | | Rp. 133.605.970.208,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | | | |
| 1. Semula | | Rp. 678.620.173.000,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | <u>Rp. (1.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | | Rp. 678.620.172.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | | | |
| 1. Semula | | Rp. 50.248.330.000,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | <u>Rp. ,00</u> | |
| Jumlah Alokasi Khusus setelah Perubahan | | | Rp. 50.248.330.000,00 |
| (4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendapatan | | | |
| a. Hibah | | | |
| 1. Semula | | Rp. 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |

| | | | |
|--|------------|--------------------------|------------------------|
| b. Dana Darurat | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |
| c. Dana Bagi hasil Pajak | | | |
| 1. Semula | Rp. | 41.348.167.871,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>32.109.350.645,00</u> | |
| Jumlah Bagi hasil pajak setelah Perubahan | | | Rp. 73.457.518.516,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus | | | |
| 1. Semula | Rp. | 137.977.482.000,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>8.736.626.000,00</u> | |
| Jumlah Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan | | | Rp. 146.714.108.000,00 |
| e. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya | | | |
| 1. Semula | Rp. | 8.750.000.000,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | | | Rp. 8.750.000.000,00 |

Pasal 3

(1).Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

| | | | |
|---|------------|---------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | | | |
| 1. Semula | Rp. | 676.596.722.516,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>47.851.908.518,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | | Rp. 724.448.631.034,00 |
| b. Belanja Langsung | | | |
| 1. Semula | Rp. | 587.999.134.304,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>102.516.040.500,00</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | | Rp.690.515.174.804,00 |

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

| | | | |
|---|-----|--------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | | | |
| 1. Semula | Rp. | 665.856.374.139,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>47.065.908.518,00</u> | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan | | | Rp. 712.922.282.657,00 |
| b. Belanja Bunga | | | |
| 1. Semula | Rp. | ,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>,00</u> | |
| Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan | | | Rp. ,00 |
| c. Belanja Subsidi | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan | | | Rp. ,00 |
| d. Belanja Hibah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 4.814.417.000,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan | | | Rp. 4.814.417.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 1. Semula | Rp. | 3.893.250.000,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>786.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan | | | Rp. 4.679.250.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.032.681.377,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>,00</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | | | Rp. 1.032.681.377,00 |

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| h. Belanja Tidak Terduga | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | | |
| a. Belanja pegawai | | |
| 1. Semula | Rp. | 50.707.644.860,00 |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>16.872.919.725,00</u> |
| Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. | 67.580.564.585,00 |
| b. Belanja Barang dan jasa | | |
| 1. Semula | Rp. | 277.801.909.834,00 |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>30.965.202.060,00</u> |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. | 308.767.111.894,00 |
| c. Belanja Modal | | |
| 1. Semula | Rp. | 259.489.579.610,00 |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>54.677.918.715,00</u> |
| Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan | Rp. | 314.167.498.325,00 |

Pasal 4

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : | | |
| a. Penerimaan sejumlah | | |
| 1. Semula | Rp. | 54.132.381.367,00 |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>85.078.846.393,64</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 139.211.227.760,64 |
| b. Pengeluaran sejumlah | | |
| 1. Semula | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>2.282.718.546,64</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 12.282.718.546,64 |

(2).Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

| | | | |
|--|------------|-------------|------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | Rp. | 0,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan | | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah piutang daerah setelah Perubahan | | Rp. | 0,00 |

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

| | | | |
|--|------------|-------------|------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah : | | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | | Rp. | 0,00 |

| | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | | | |
| 1. Semula | | Rp. 10.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan | | | Rp. 10.000.000.000,00 |
| | | | |
| c. Pembayaran utang Pihak Ketiga sejumlah | | | |
| 1. Semula | | Rp. 2.282.718.546,64 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah Perubahan | | | Rp. 2.282.718.546,64 |
| | | | |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | | | |
| 1. Semula | | Rp. 0,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------|---|
| a. | Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| b. | Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD. |
| c. | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| e. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. | Lampiran VI | Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| g. | Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| h. | Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| i. | Lampiran IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Agustus 2014**

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 7

**Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Per-UU
Setda Kota Jambi,**

dto

EDRIANSYAH,SH.MM

PENATA Tk. I

Nip. 19720614 199803 1 005